

2022

PROFIL PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya buku "**Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022**" ini tepat pada waktunya.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas Pendidikan serta Bappeda terkait perencanaan Pendidikan di Kabupaten Tangerang ke depannya. Selain itu, buku profil ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun instansi-instansi terkait lainnya.

Di dalam buku ini ditampilkan antara lain terkait capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD Kabupaten Tangerang, jumlah satuan Pendidikan, jumlah siswa, jumlah guru, ketersediaan sarana dan prasarana dan entitas lainnya pada jenjang pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Nonformal (PAUD dan Dikmas).

Tangerang, Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Drs. H. Syaifullah, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Isu-Isu Strategis 2
D. Demografi Kabupaten Tangerang 5

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN
A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi 7
B. Struktur Organisasi 7
C. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 9
D. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Hasil Reviu 12
E. Pegawai Dinas Pendidikan 13
F. Program Dinas Pendidikan dan Capaian 13

BAB III DATA KEPENDIDIKAN
A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM) 16
B. Data Pokok Pendidikan Dasar 17
C. Data Pokok Pendidikan Nonformal 42
D. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang 5
Gambar 1.2 Persentase Penduduk 6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 8
Gambar 3.1 Capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang 16
Gambar 3.2 Sebaran SD Berdasarkan Status Perkecamatan 18
Gambar 3.3 Sebaran SMP Berdasarkan Status PerKecamatan 18
Gambar 3.4 Persentase Siswa Perjenjang 20
Gambar 3.5 Persentase Guru SD dan SMP 22
Gambar 3.6 Persentase Guru SD Berdasarkan Status Kepegawaian 23
Gambar 3.7 Persentase Guru SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 24
Gambar 3.8 Persentase Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 25
Gambar 3.9 Persentase Guru SMP Berdasarkan Status Kepegawaian 26
Gambar 3.10 Persentase Guru SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 27
Gambar 3.11 Persentase Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 28
Gambar 3.12 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Pegawai 29
Gambar 3.13 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 30
Gambar 3.14 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 31
Gambar 3.15 Sebaran Data Pengawas SD perkecamatan 32
Gambar 3.16 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal 43
Gambar 3.17 Sebaran Data PAUD 44
Gambar 3.18 Sebaran Data PKBM 44
Gambar 3.19 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar 45
Gambar 3.20 Persentase Pendidik Nonformal 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan 2
Tabel 1.2 Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan 6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu 12
Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pendidikan 13
Tabel 2.4 Program Dinas Pendidikan Tahun 2022 14
Tabel 3.1 Sekolah Berdasarkan Status Sekolah 17
Tabel 3.2 Sekolah Berdasarkan Akreditasi 19
Tabel 3.3 Siswa Berdasarkan Jenjang Sekolah 19
Tabel.3.4 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SD 20
Tabel.3.5 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP 21
Tabel 3.6 Guru SD dan SMP 21
Tabel 3.7 Guru SD Berdasarkan Status Kepegawaian 22
Tabel 3.8 Guru SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 23
Tabel 3.9 Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 24
Tabel 3.10 Guru SMP Berdasarkan Status Kepegawaian 25
Tabel 3.11 Guru SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 26
Tabel 3.12 Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 27
Tabel 3.13 Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 28
Tabel 3.14 Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 29
Tabel 3.15 Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 30
Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP 32
Tabel.3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD 33
Tabel.3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP 33
Tabel 3.19 Sarana Prasarana jenjang SD 34
Tabel 3.20 Sarana Prasarana jenjang SMP 34
Tabel 3.21 Prasarana Sanitasi Sekolah Jenjang SD 35
Tabel 3.22 Prasarana Sanitasi Sekolah jenjang SMP 35
Tabel 3.23 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP 36
Tabel 3.24 Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SD Negeri 37
Tabel 3.25 Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SD Swasta 38

Tabel 3.26 Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SMP Negeri 38
Tabel 3.27 Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SMP Swasta 39
Tabel 3.28 Kondisi Sarana Prasarana SD Tahun 2022 39
Tabel 3.29 Kondisi Sarana Prasarana SMP Tahun 2022 40
Tabel 3.30 Lembaga Pendidikan Nonformal 43
Tabel 3.31 Data Peserta Didik/ Wajib Belajar 45
Tabel 3.32 Pendidik Nonformal 46

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki arah kebijakan merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Misi yang diamanatkan adalah Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat menuju Masyarakat yang Religius; dan Meningkatkan Akses Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Buku Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang disusun dalam upaya menjadi acuan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pada buku ini disajikan tentang entitas data yang mendukung terwujudnya program pembangunan pendidikan yaitu satuan pendidikan/ sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), peserta didik dan substansi pendidikan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Harapan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang yaitu mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah untuk memberikan gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara komprehensif dengan situasi dan isu yang berkembang sehingga menjadikan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkontribusi dalam mencapai target kinerja sesuai visi misi Kabupaten Tangerang. Profil Dinas Pendidikan menjadi acuan program dan kegiatan di tahun mendatang sebagai bahan perencanaan untuk pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta perbaikan manajemen pendidikan.

C. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, target capaian kinerja Tahun 2022 dan isu strategis daerah, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tidak Semua Lapisan Masyarakat Memperoleh Layanan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang Berkualitas	1. Ketersediaan Akses Layanan PAUD belum optimal	1. Peran Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan Paud Bagi Pengembangan Potensi Anak (*Golden Age*) masih rendah 2. Kurangnya Jumlah TK Negeri 3. Adanya lembaga PAUD yang belum memenuhi 8 Standar Pendidikan 4. Belum Semua Anak Usia PAUD Memperoleh Layanan Pendidikan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		1. Ketersediaan Akses Pendidikan Masyarakat Belum Optimal	1. Ketersediaan Lembaga Kursus dan PKBM belum Merata 2. Layanan Lembaga Kursus Dan PKBM Belum Memenuhi 8 Standar Pendidikan 3. Kompetensi Lembaga Kursus Dan Pelatihan Belum Memenuhi Kebutuhan Kerja secara Maksimal
2	Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Berkualitas Belum Maksimal	Belum terwujudnya akses layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata	1. Rasio Peserta Didik Terhadap Ruang Kelas belum ideal; 2. Masih Adanya Peserta Didik yang Putus Sekolah 3. Belum Maksimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD Dan SMP 4. Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Pendidikan
3	Manajemen Pendidikan belum Optimal	1. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Dan Tenaga Struktural Lainnya masih rendah	1. Kualitas, Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Masih Rendah 2. Distribusi Guru Dan Tenaga Kependidikan Belum Merata 3. Secara Umum Jumlah Guru Sudah Mencukupi, tetapi Secara Linearitas Masih Kurang
		2. Kualitas Sistem Ketatausahaan belum optimal	Kurangnya Tenaga Administrasi Umum Dan Tenaga Tata Usaha Sekolah Yang Memiliki Kemampuan Dan Keterampilan Ketatausahaan Dan Tata Naskah Dinas

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		3. Pengembangan Potensi, Bakat, Minat, Prestasi Akademik Dan Non Akademik Peserta Didik masih Belum Optimal	1. Fasilitas Dan Pengembangan Potensi, Bakat, Dan Minat Peserta Didik belum maksimal 2. Nilai Ujian Nasional belum mencapai target maksimal
		4. Kualitas Pembelajaran Belum Maksimal	1. Belum Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) 2. Pelaksanaan Kurikulum Belum Maksimal 3. Tingkat Literasi bagi Peserta Didik masih rendah 4 Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran Kurang Memadai
4	Memudarnya Karakter Dan Jatidiri Peserta Didik	1. Belum Maksimalnya Fungsi Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pengamalan Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan sehari-hari	1. Belum Maksimalnya Pengembangan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan 2. Menurunnya Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari 3. Rendahnya Kesadaran Akan Keberagaman Budaya Dan Kearifan Lokal Serta Penghormatan Terhadap Adat Dan Tradisi Lokal

D. Demografi Kabupaten Tangerang

a. Peta Wilayah

Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ibu kota Kabupaten adalah Tigaraksa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km^2 yang terdiri atas 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa. Wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan wilayah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang.



Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Tangerang

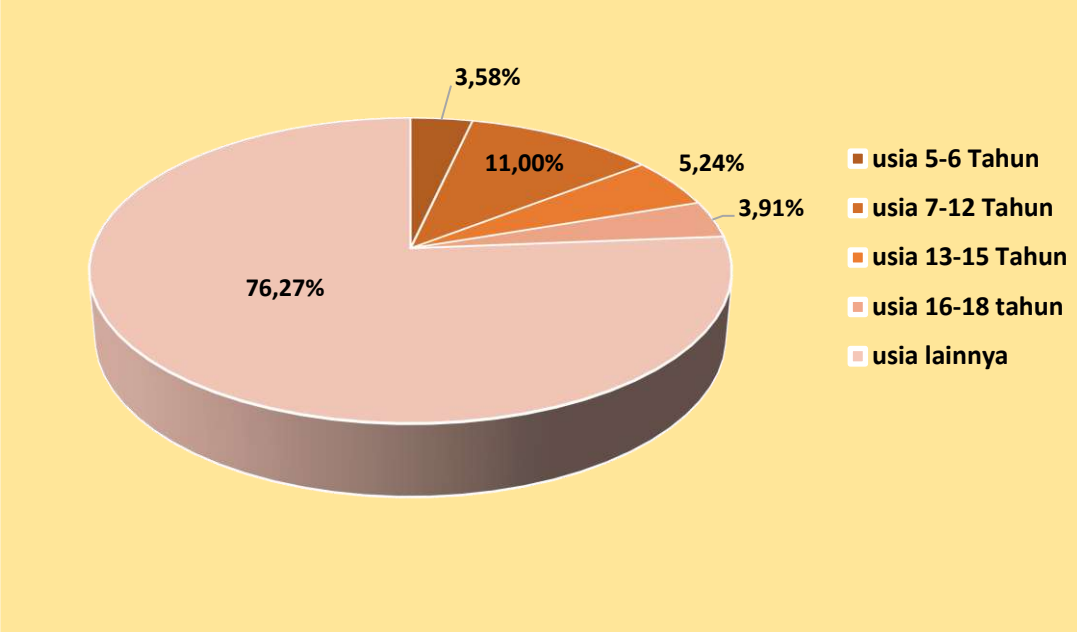
b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.185.552 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk usia sekolah 5 sampai 18 tahun 756.079 jiwa.

Tabel 1.2

Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan

No	Kelompok usia	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun	114.040
2	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	350.488
3	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	167.047
4	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	124.504
5	Jumlah penduduk usia lainnya	2.429.473
Jumlah penduduk seluruhnya		3.185.552



Gambar 1.2

Persentase Penduduk

(sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang 2022 Semester 1)

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terdiri dari:

A. Kepala;
B. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Sub Bagian Perencanaan
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3. Sub Bagian Keuangan
C. Bidang Pendidikan Dasar
   1. Seksi Kurikulum SD
   2. Seksi Kesiswaan SD; dan

3. Seksi Sarana dan Prasana SD

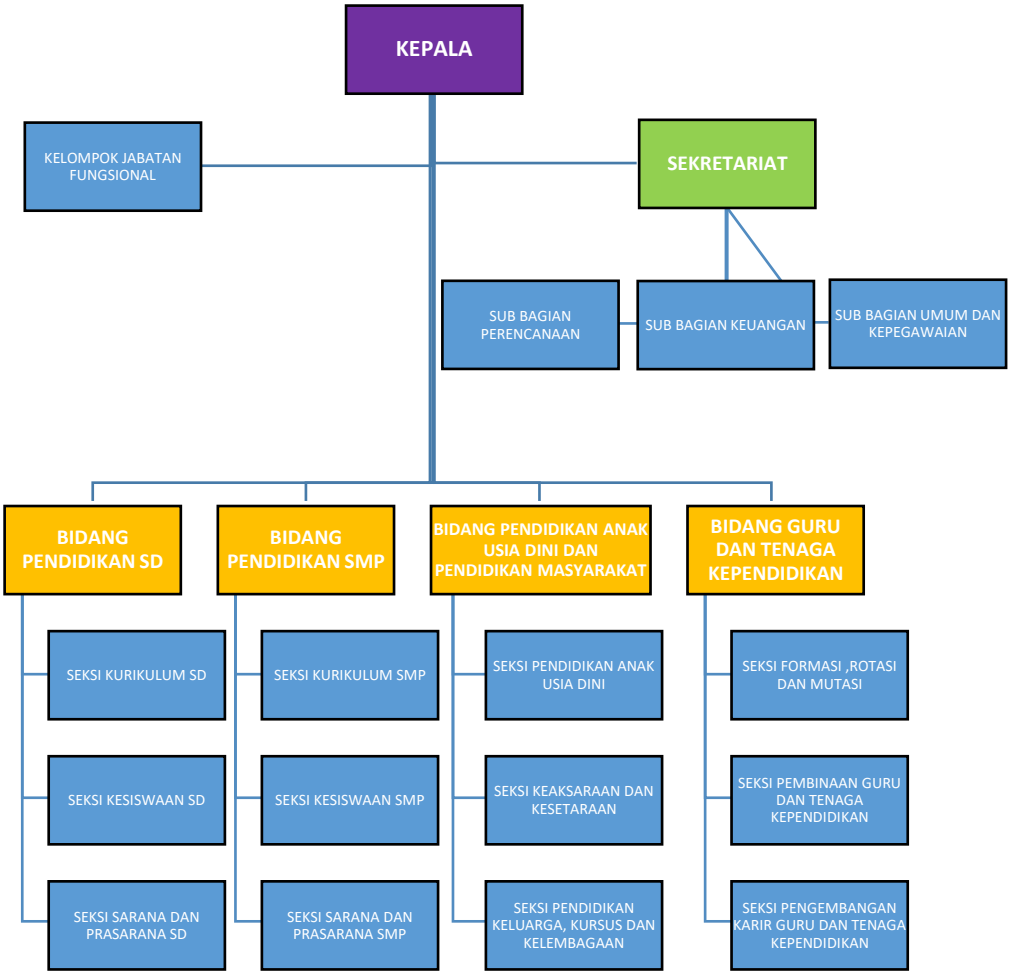
D. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   1. Seksi Kesiswaan SMP
   2. Seksi Kurikulum SMP;dan
   3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP

E. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
   1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
   2. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
   3. Seksi Pendidikan Keluarga, Kursus dan Kelembagaan

F. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
   Seksi Formasi, Rotasi, dan Mutasi
   1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
   2) Seksi Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan

G. Unit Pelaksana Teknis; dan

H. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

C. Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1) *Religius* mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2) *Cerdas* yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3) *Sehat* yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4) *Sejahtera* mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2) Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3) Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

b. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik Dalam Pengalaman Nilai-Nilai Agama	Jumlah Peserta Didik yang dapat Baca Tulis Al-Quran	0	5000	5000	5000	5000
2	Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar yang merata dan berkualitas	Meningkatnya Kualitasnya Layanan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program GSM	70	85	100	115	130
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	37,50	39,00	41,50	43,00	44,50
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,64	97,14	97,64	98,14	98,64
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	89,16	89,66	90,16	90,66	91,16
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65	68	70	71	72

D. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Hasil Reviu

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pendidikan melakukan reviu terhadap perencanaan strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik Dalam Pengalaman Nilai-Nilai Agama	Jumlah Peserta Didik yang dapat Baca Tulis Al-Quran	0	5000	5000	5000	5000
2	Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar yang merata dan berkualitas	Meningkatnya Kualitasnya Layanan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program GSM	70	85	100	115	130
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	37,50	39,00	41,50	43,00	44,50
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,64	97,14	97,64	98,14	98,64
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	89,16	89,66	90,16	90,66	91,16
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65	68	70	71	72

E. Pegawai Dinas Pendidikan

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terdiri atas jabatan struktural dan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pegawai struktural terdiri dari ASN dan Non ASN. Pegawai struktural terdiri atas pegawai Eselon II, III, IV dan Non Eselon. Pegawai fungsional dalam hal ini adalah pengawas dan penilik.

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal. Tugas pokok Penilik adalah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pendidikan

Jabatan Eselon	ASN	Non ASN	Jumlah
a. Eselon II	1	0	1
b. Eselon III	5	0	5
c. Eselon IV	15	0	15
d. Non Eselon	41	58	99
e. Fungsional Pengawas	75	0	75
f. Fungsional Penilik	39	0	39
Jumlah	**176**	**58**	**234**

F. Program Dinas Pendidikan dan Capaian

Program Dinas Pendidikan di Tahun 2022 terdiri atas 11 Program yang terdistribusi ke dalam 120 kegiatan pada 3 (tiga) bidang sesuai kewenangannya.

Tabel 2.4
Program Dinas Pendidikan Tahun 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Indikator
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	93,5
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	77,80
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	45,6

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Indikator
1	2	3	4
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	0,13
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Peserta Didik	10.000
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peserta Didik	10.000

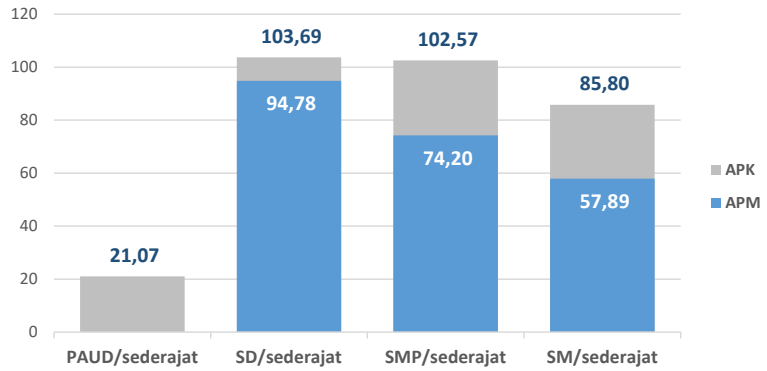
BAB III
DATA KEPENDIDIKAN

Profil Data Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2022 bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baik untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (PNF) kondisi data tanggal 3 November 2022. Selain Dapodik, sumber data yang digunakan adalah data internal Dinas seperti data pengawas dan penilik. Dalam profil ini juga ditampilkan capaian APK APM dari Kabupaten Tangerang Tahun 2021.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk (khususnya usia sekolah) untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut usia sekolah yang berada disekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Berikut disajikan capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang 21-22.



Gambar 3.1 Capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2021, Kemendikbudristek

Berdasarkan Gambar 3.1. Dapat dilihat capaian APK Paud Sederajat sebesar 21,07% artinya hanya 21 anak dari 100 penduduk usia 3-6 tahun di Kabupaten Tangerang yang Paud. Angka ini masih kecil karena masih banyak anak yang belum menempuh Pendidikan prasekolah (sebelum sekolah dasar) dan masih banyak satuan Pendidikan di Paud yang belum masuk pendataan Dapodik. Hal ini bisa menjadi evaluasi Dinas untuk mendorong satuan-satuan Pendidikan di Paud untuk memperbaiki datanya. Selanjutnya adalah APK dan APM jenjang SD sederajat di Kabupaten Tangerang sudah tinggi yaitu 103,69% untuk APK dan 94,78% untuk APM. Artinya hampir semua penduduk usia 7-12 di Kabupaten Tangerang sedang menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar sederajat dan Sebagian siswa ada yang usianya belum 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dilihat dari APK nya yang lebih dari 100%.

Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat, Kabupaten Tangerang memiliki capaian APK 102,57% dan APM 74,20%. Artinya 3 per 4 penduduk Kabupaten Tangerang usia 13 sampai 15 tahun menempuh Pendidikan SMP sederajat. Ada sebagian dari siswa SMP yang usianya kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun dilihat dari APKnya yang juga lebih dari 100%.

B. Data Pokok Pendidikan Dasar

1. Data Sekolah

Data sekolah jenjang SD dan SMP akan diuraikan berdasarkan status sekolah dan akreditasinya, seperti berikut:

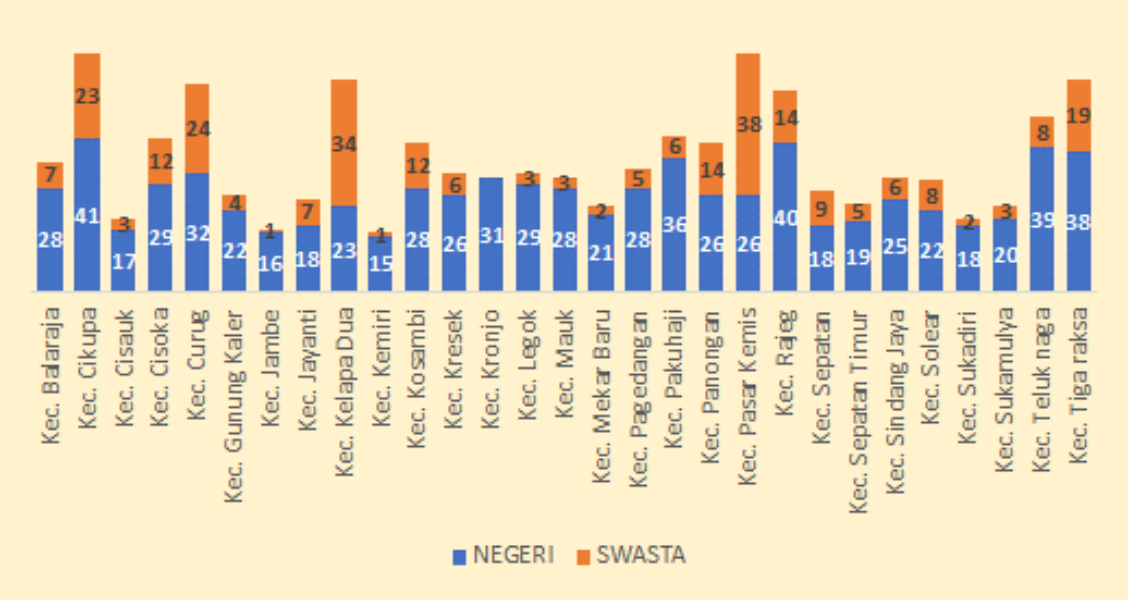
Tabel 3.1

Sekolah Berdasarkan Status Sekolah

Status Sekolah	SD	SMP	Jumlah
a. Negeri	759	91	850
b. Swasta	279	372	651
Jumlah	**1.038**	**463**	**1.501**

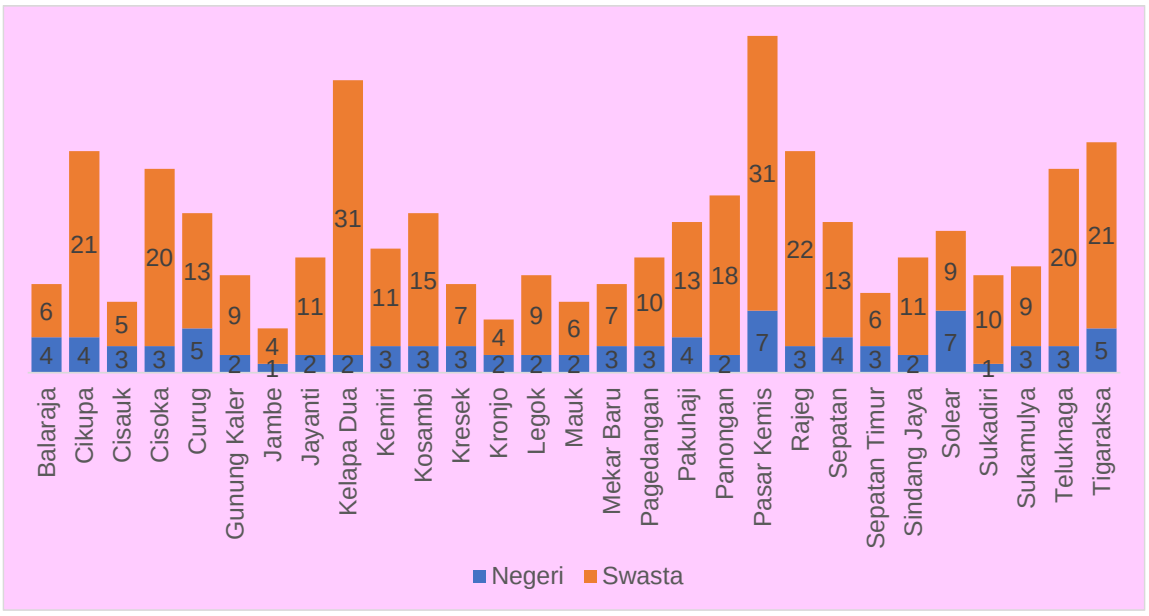
Jumlah sekolah sebanyak 1.501, terdiri atas SD berjumlah 1.038 sekolah dan SMP berjumlah 463 sekolah. Jumlah SD negeri 759 sekolah, SMP negeri 91

sekolah. Jumlah SD swasta 279 sekolah dan SMP swasta 372 sekolah. Berikut sebaran sekolah perkecamatan:



Gambar 3.2

Sebaran SD Berdasarkan Status Perkecamatan



Gambar 3.3

Sebaran SMP Berdasarkan Status PerKecamatan

Tabel 3.2

Sekolah Berdasarkan Akreditasi

Akreditasi	SD			SMP			Jumlah
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	
A	190	104	294	48	80	128	**422**
B	558	111	669	33	170	203	**872**
C	9	30	39	8	84	92	**131**
Belum Terakreditasi	2	34	36	2	38	40	**76**
Jumlah	759	279	**1.038**	91	372	**463**	**1.501**

Sekolah yang sudah diakreditasi dengan nilai A, B, dan C berjumlah 1.427 atau sebesar 94,94%. Sejumlah 76 sekolah atau sebesar 5,06% belum terakreditasi.

2. Data Sumber Daya Manusia

   a. Data Siswa

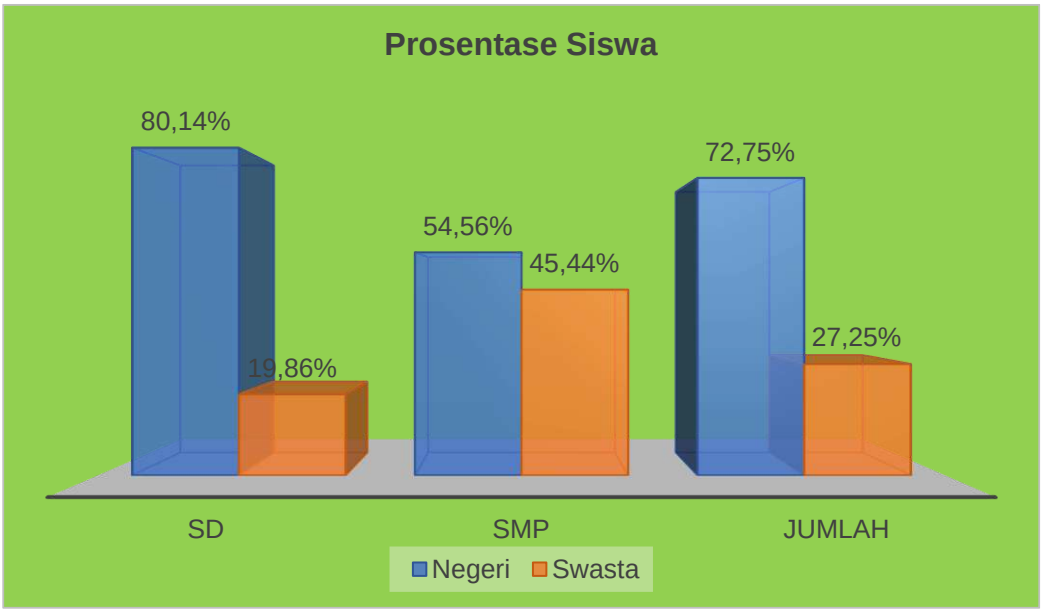
   Berdasarkan sumber data dari DAPODIK, jumlah siswa jenjang SD dan SMP pada sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3

Siswa Berdasarkan Jenjang Sekolah

Siswa pada Sekolah	SD	SMP	Total
a. Negeri	260.090	71.860	331.950
b. Swasta	64.472	59.847	124.319
Total	**324.562**	**131.707**	**456.269**

Siswa jenjang SD berjumlah 324.562 orang, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 260.090 orang dan di sekolah swasta berjumlah 64.472 orang. Siswa jenjang SMP berjumlah 131.707 orang, terdistribusi di sekolah negeri berjumlah 71.860 orang dan di sekolah swasta berjumlah 59.847 orang.



Gambar 3.4

Persentase Siswa Perjenjang

Persentase siswa SD dan SMP pada sekolah negeri sebesar 72,75%. Persentase siswa SD dan SMP pada sekolah swasta sebesar 27,25%. Data siswa berdasarkan tingkatan kelas dan rombongan belajarnya pada jenjang SD dan SMP disajikan pada Tabel berikut:

Tabel.3.4

Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SD

Tingkatan	Jumlah siswa	Rombel
a. Kelas 1	60.524	2.034
b. Kelas 2	52.485	1.841
c. Kelas 3	54.572	1.899
d. Kelas 4	53.342	1.870
e. Kelas 5	52.072	1.805
f. Kelas 6	51.567	1.786
Jumlah	**324.562**	**11.235**

Tabel.3.5

Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP

Tingkatan	Jumlah siswa	Rombel
a. Kelas 7	45.435	1.371
b. Kelas 8	43.443	1.343
c. Kelas 9	42.829	1.337
Jumlah	**131.707**	**4.051**

b. Guru

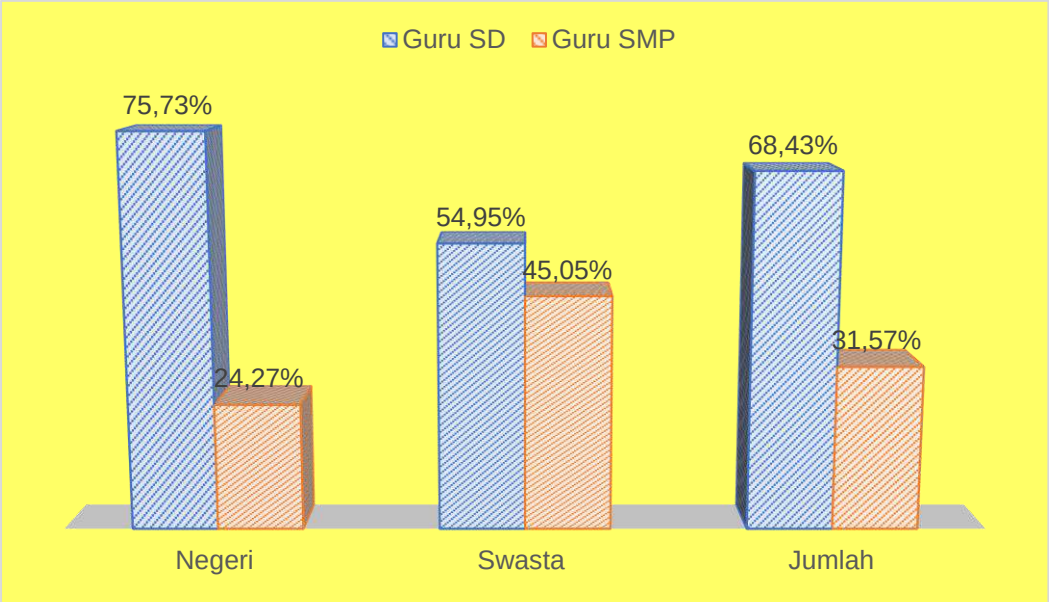
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005, pasal 8). Data guru jenjang SD dan SMP pada sekolah Negeri dan swasta dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Guru SD dan SMP

Guru berdasarkan Jenjang/ Status Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
a. Guru SD	8.899	3.500	12.399
b. Guru SMP	2.852	2.869	5.721
Jumlah	11.751	6.369	18.120

Berdasarkan Tabel 3.6, guru pada jenjang SD berjumlah 12.399 orang, guru jenjang SMP berjumlah 5.721 orang. Distribusi guru yang bertugas di sekolah negeri berjumlah 11.751 orang dan di sekolah swasta berjumlah 6.369 orang.



Gambar 3.5

Persentase Guru SD dan SMP

Persentase guru SD di sekolah negeri sebesar 75,73% dan di sekolah swasta sebesar 24,27%. Persentase Guru SMP di sekolah negeri sebesar 54,95% dan di sekolah swasta sebesar 45,05%.

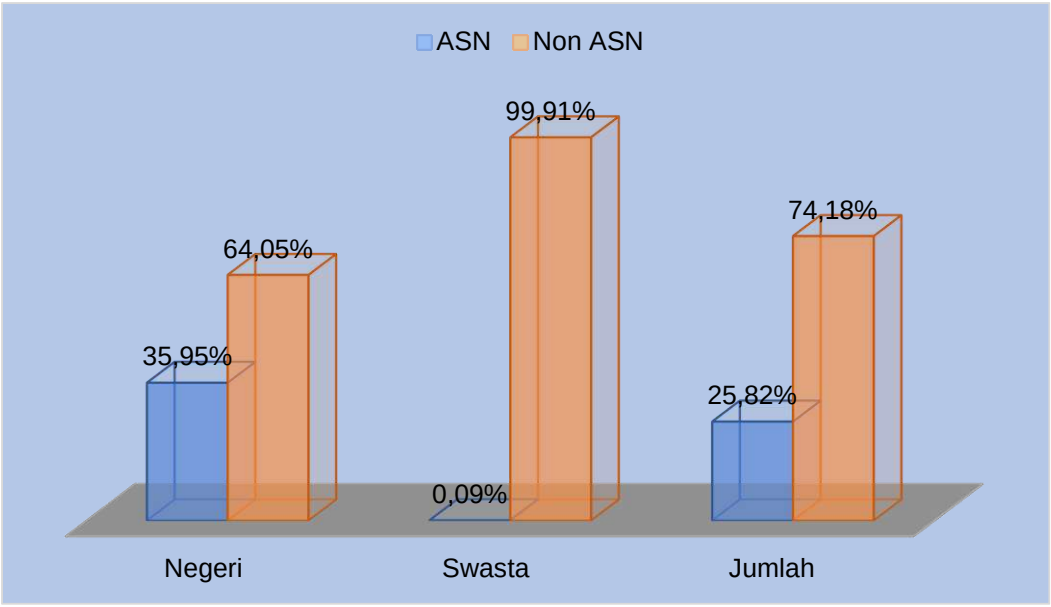
Berikut akan disajikan data guru pada jenjang SD dan SMP berdasarkan status kepegawaian, kualifikasi pendidikan dan sertifikasi pendidik.

Tabel 3.7

Guru SD Berdasarkan Status Kepegawaian

Guru berdasarkan Status Kepegawaian	SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. ASN	3.199	3	3.202
b. Non ASN	5.700	3.497	9.197
Jumlah	8.899	3.500	12.399

Sebagaimana Tabel 3.7 data Guru ASN di SD berjumlah 3.202 orang, terdistribusi di sekolah negeri 3.199 orang dan di sekolah swasta 3 orang. Guru SD Non ASN yang berjumlah 9.197 orang terdistribusi di sekolah negeri 5.700 dan di sekolah swasta 3.497 orang.



Gambar 3.6

Persentase Guru SD Berdasarkan Status Kepegawaian

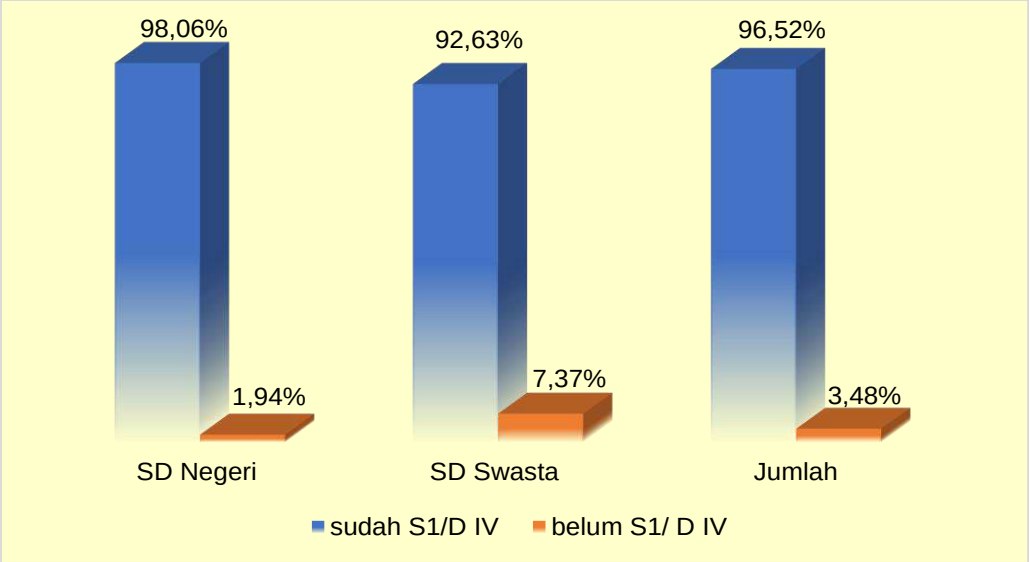
Persentase guru ASN di sekolah negeri sebesar 35,95%. Persentase guru ASN di sekolah swasta 0,09% (guru DPK). Total Persentase guru ASN pada jenjang SD sebesar 25,82% dan guru Non ASN sebesar 74,18%.

Tabel 3.8

Guru SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Guru berdasarkan Kualifikasi Ijazah	SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. sudah S1/D IV	8.726	3.242	11.968
b. belum S1/ D IV	173	258	431
Jumlah	**8.899**	**3.500**	**12.399**

Guru SD yang berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 11.968 orang, terdistribusi di sekolah negeri 8.726 orang; di sekolah swasta 3.242 orang. Guru SD yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 431 orang, di sekolah negeri 173 orang dan di sekolah swasta 258 orang.



Gambar 3.7

Persentase Guru SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

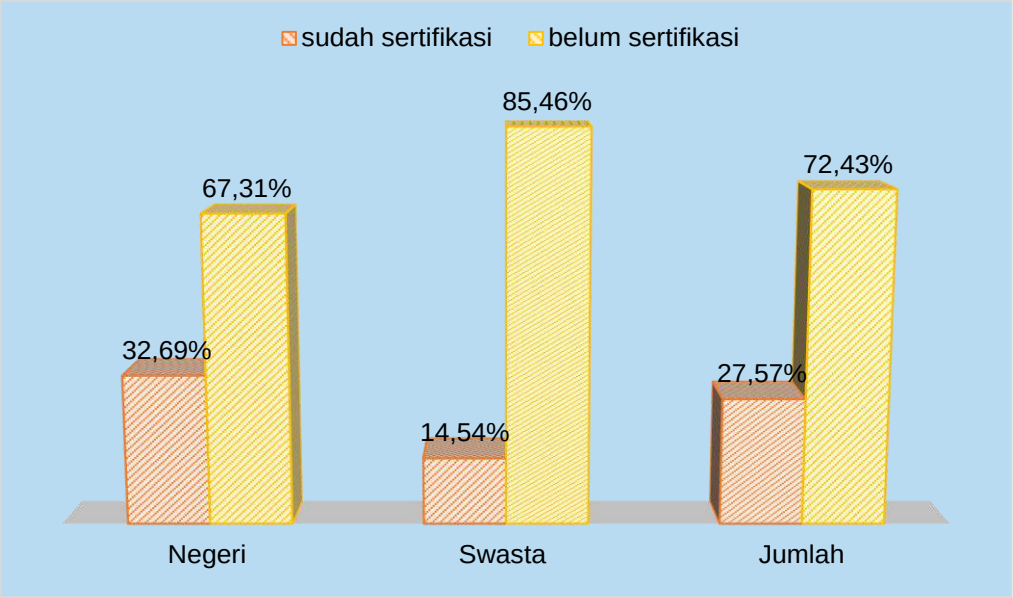
Persentase guru SD yang sudah S1/D-IV pada sekolah negeri sebesar 98,06%, pada sekolah swasta sebesar 92,63%. Persentase guru SD yang belum S1/D-IV pada sekolah negeri sebesar 1,94% dan pada sekolah swasta sebesar 7,37%. Total Persentase guru SD yang sudah S1/D-IV sebesar 96,52% dan yang belum S1/D-IV sebesar 3,48%.

Tabel 3.9

Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Guru berdasarkan Sertifikasi	SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. sudah sertifikasi	2.909	509	3.418
b. belum sertifikasi	5.990	2.991	8.981
Jumlah	**8.899**	**3.500**	**12.399**

Guru SD dengan jumlah 3.418 orang sudah sertifikasi, dengan sebaran di sekolah negeri 2.909 orang dan di sekolah swasta 509 orang. Guru SD yang belum sertifikasi berjumlah 8.981 orang, di sekolah negeri 5.990 orang dan di sekolah swasta 2.991 orang.



Gambar 3.8

Persentase Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

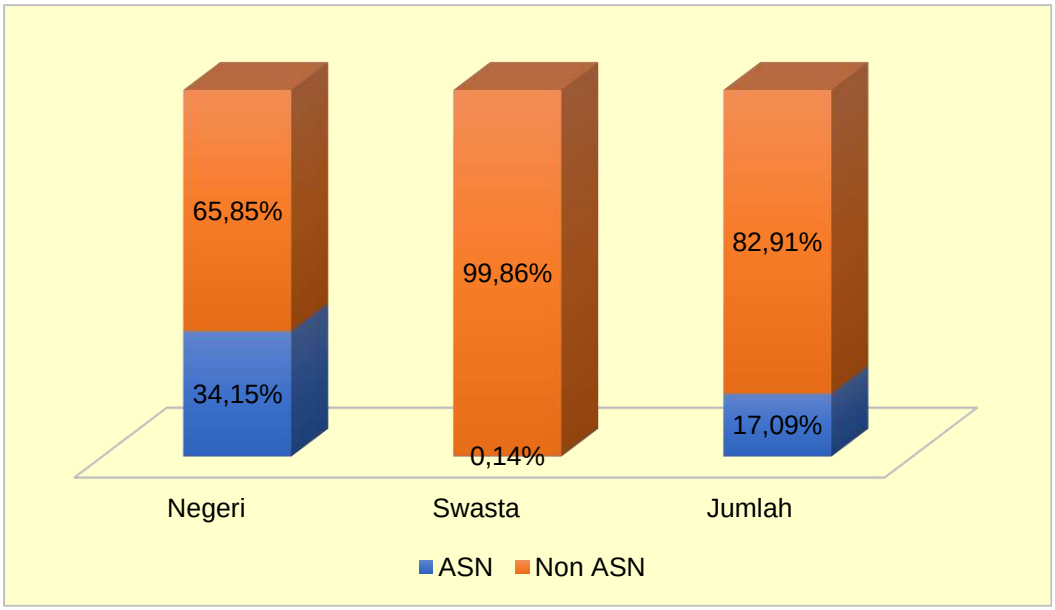
Persentase guru SD yang sudah sertifikasi pada sekolah negeri sebesar 32,69%, pada sekolah swasta sebesar 14,54%. Sebaliknya Persentase guru SD yang belum sertifikasi pada sekolah negeri sebesar 67,31% dan pada sekolah swasta sebesar 85,46%. Total Persentase guru SD yang sudah sertifikasi sebesar 27,57% dan yang belum sertifikasi sebesar 72,43%.

Tabel 3.10

Guru SMP Berdasarkan Status Kepegawaian

Guru berdasarkan Status Kepegawaian	SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. ASN	974	4	978
b. Non ASN	1.878	2.865	4.743
Jumlah	**2.852**	**2.869**	**5.721**

Total Guru ASN jenjang SMP berjumlah 978 orang, terdistribusi di sekolah negeri 974 orang dan di sekolah swasta 4 orang. Guru Non ASN dengan jumlah 4.743 orang, terdistribusi di sekolah negeri 1.878 dan di sekolah swasta 2.865 orang.



Gambar 3.9

Persentase Guru SMP Berdasarkan Status Kepegawaian

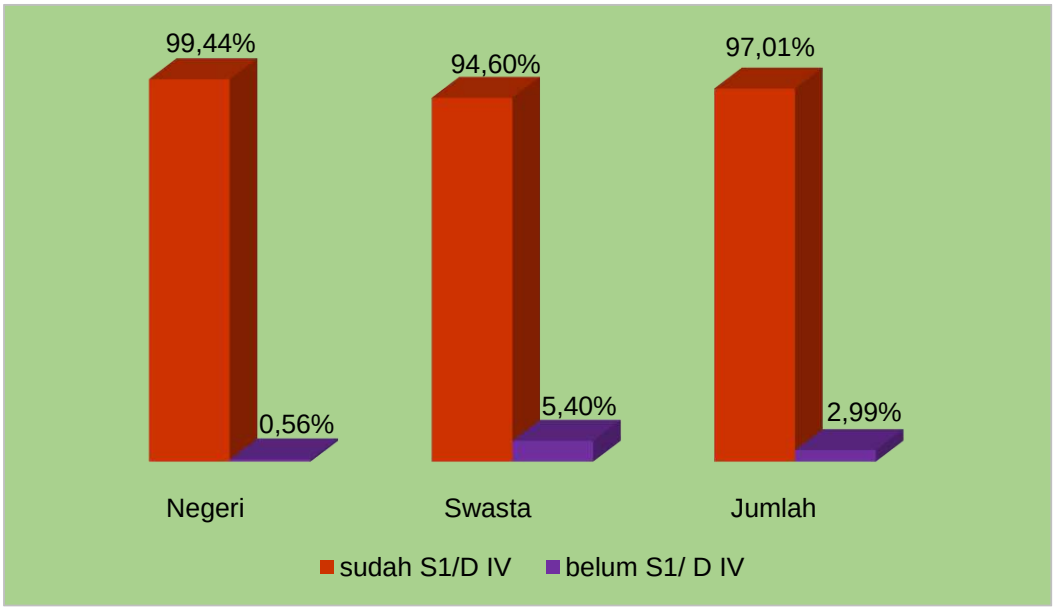
Persentase guru ASN jenjang SMP di sekolah negeri sebesar 34,15%, di sekolah swasta sebesar 0,14% (guru DPK). Persentase guru Non ASN di sekolah negeri sebesar 65,85%, di sekolah swasta sebesar 99,86%. Total Persentase guru ASN pada jenjang SMP sebesar 17,09% dan guru Non ASN sebesar 82,91%.

Tabel 3.11

Guru SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Guru berdasarkan Kualifikasi Ijazah	SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. sudah S1/D IV	2.836	2.714	5.550
b. belum S1/ D IV	16	155	171
Jumlah	**2.852**	**2.869**	**5.721**

Guru SMP yang sudah berkualifikasi S1/D-IV sejumlah 5.550 orang, terdistribusi di sekolah negeri 2.836 orang dan di sekolah swasta 2.714 orang. Guru SMP yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 171 orang, di sekolah negeri 16 orang dan di sekolah swasta 155 orang.



Gambar 3.10

Persentase Guru SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

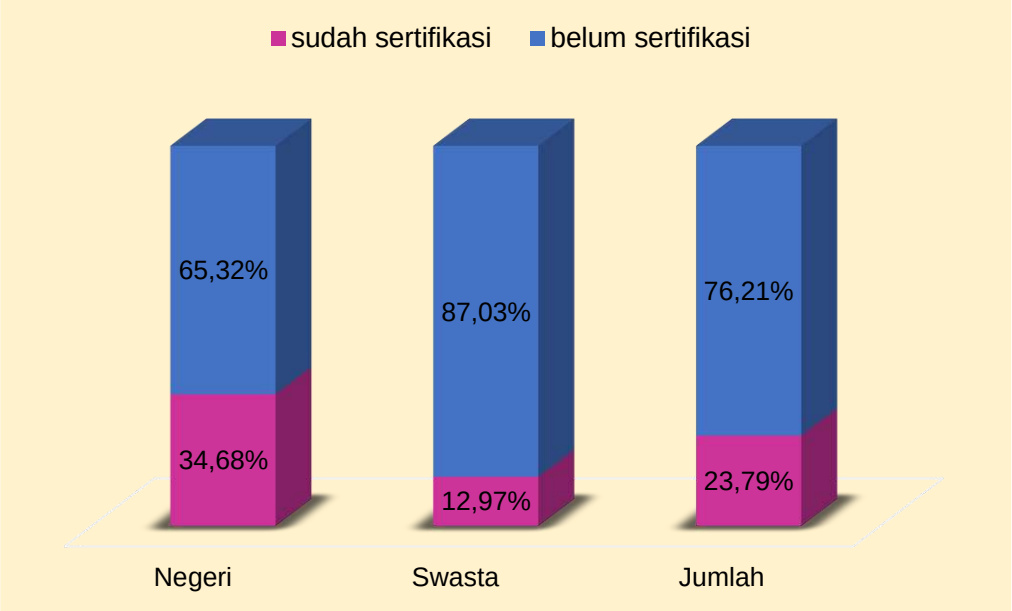
Persentase guru SMP yang sudah S1/D-IV pada sekolah negeri sebesar 99,44% dan pada sekolah swasta sebesar 94,60%. Persentase guru SMP yang belum S1/D-IV pada sekolah negeri sebesar 0,56% dan pada sekolah swasta sebesar 5,40%. Total Persentase guru SMP yang sudah S1/D-IV sebesar 97,01% dan yang belum S1/D-IV sebesar 2,99%.

Tabel 3.12

Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Guru berdasarkan Sertifikasi	SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
a. Sudah sertifikasi	989	372	1.361
b. Belum sertifikasi	1.863	2.497	4.360
Jumlah	**2.852**	**2.869**	**5.721**

Guru SMP yang sudah sertifikasi berjumlah 1.361 orang, terdistribusi di sekolah negeri 989 orang dan di sekolah swasta 372 orang. Guru SMP yang belum sertifikasi berjumlah 4.360 orang, di sekolah negeri 1.863 orang dan di sekolah swasta 2.497 orang.



Gambar 3.11

Persentase Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Persentase guru SMP yang sudah sertifikasi pada sekolah negeri sebesar 34,68%, pada sekolah swasta sebesar 12,97%. Persentase guru SMP yang belum sertifikasi pada sekolah negeri sebesar 65,32% dan pada sekolah swasta sebesar 87,03%. Total Persentase guru SMP yang sudah sertifikasi sebesar 23,79% dan yang belum sertifikasi sebesar 76,21%.

c. Kepala Sekolah

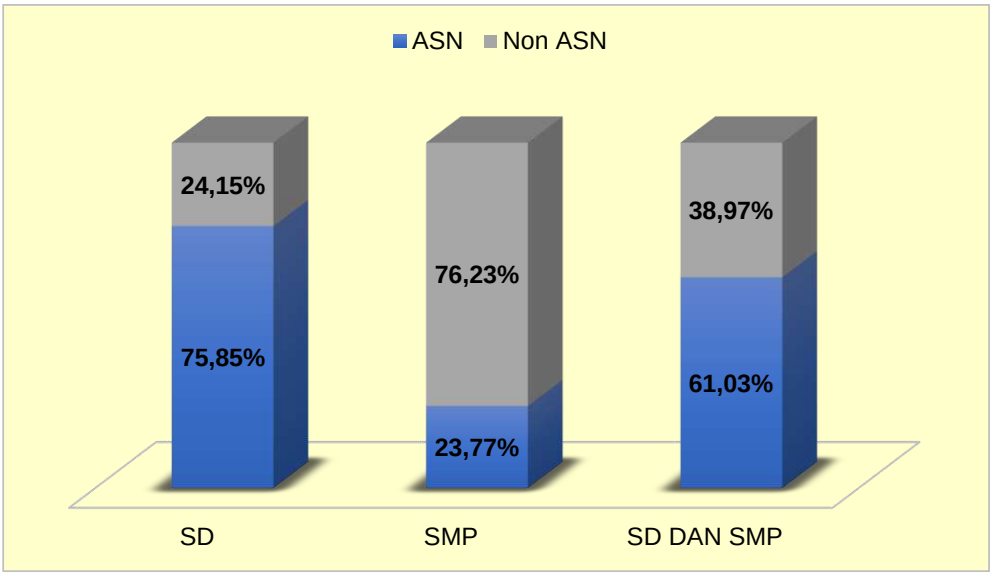
Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Berasarkan pada DAPODIK, data Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.13

Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Kepala Sekolah	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
a. ASN	735	3	738	90	2	92
b. Non ASN	0	235	235	0	295	295
Jumlah	**735**	**238**	**973**	**90**	**297**	**387**

Kepala SD berjumlah 973 orang terdiri dari ASN 735 orang dan Non ASN 238 orang. Kepala SMP berjumlah 387 orang terdiri dari ASN 92 orang, dan Non ASN 295 orang.



Gambar 3.12

Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Pegawai

Persentase Kepala Sekolah ASN jenjang SD sebesar 75,85% dan SMP 23,77%. Persentase Kepala Sekolah Non ASN jenjang SD sebesar 24,15% dan SMP 76,23%.

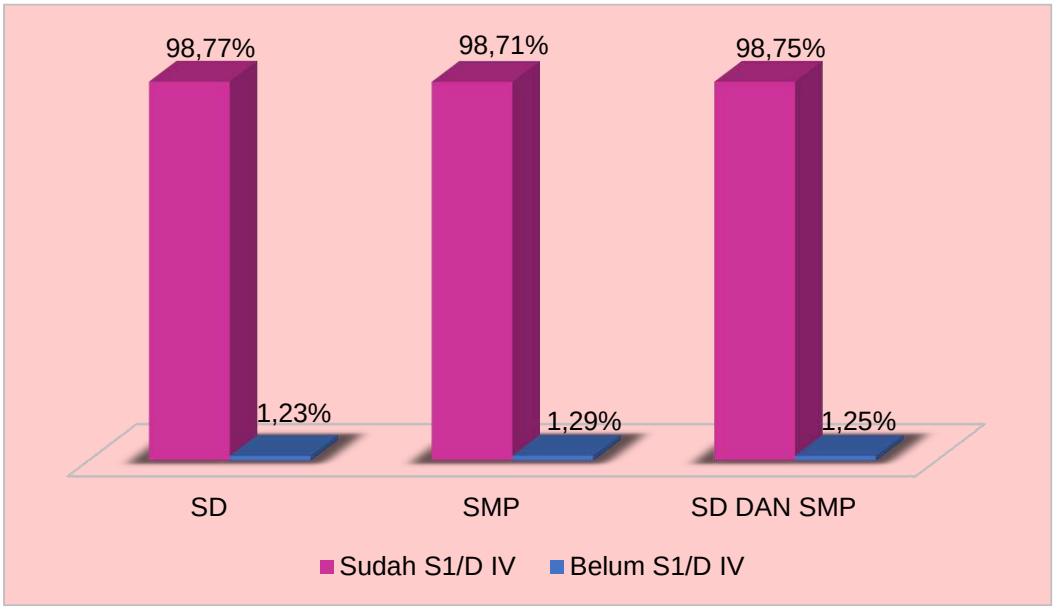
Tabel 3.14

Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kepala Sekolah	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
a.Sudah S1/D IV	733	228	961	90	292	382
b.Belum S1/D IV	2	10	12	0	5	5
Jumlah	**735**	**238**	**973**	**90**	**297**	**387**

Kepala SD yang berkualifikasi S1/D-IV berjumlah 961 orang. Kepala SD yang belum berkualifikasi S1/D-IV berjumlah 12 orang. Kepala SMP yang

berkualifikasi S1/D-IV berjumlah 382 orang. Kepala SMP yang belum berkualifikasi S1/ D-IV berjumlah 5 orang dan bertugas di sekolah swasta.



Gambar 3.13

Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Total Persentase Kepala Sekolah yang berkualifikasi S1/D-IV sebesar 98,75% dan yang belum berkualifikasi S1/D-IV sebesar 1,25%.

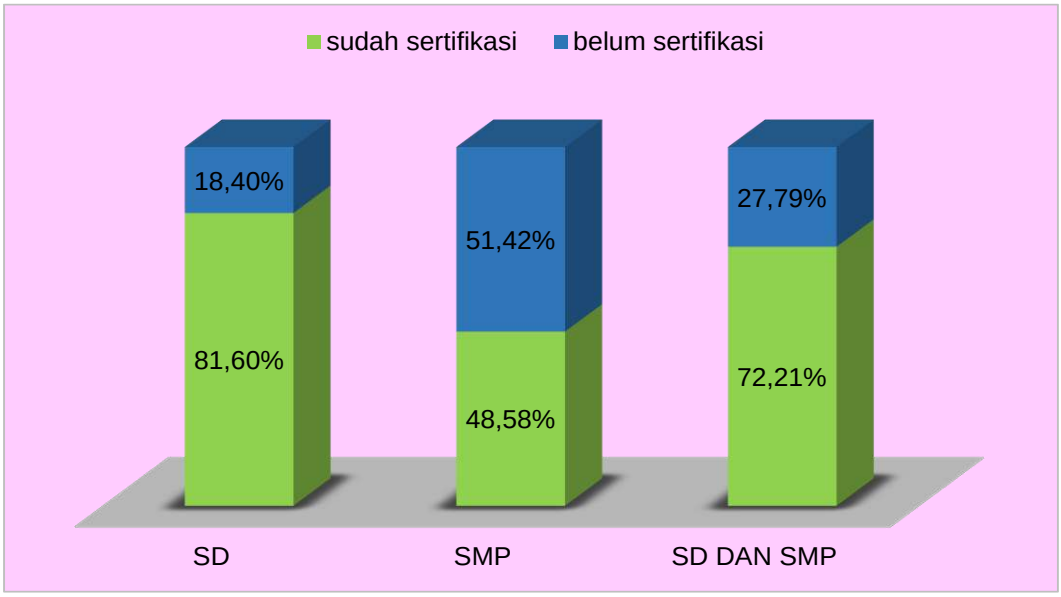
Tabel 3.15

Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Kepala Sekolah	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
a. sudah sertifikasi	708	86	794	83	105	188
b. belum sertifikasi	27	152	179	7	192	199
Jumlah	**735**	**238**	**973**	**90**	**297**	**387**

Kepala SD yang sudah sertifikasi berjumlah 794 orang, yang bertugas di sekolah negeri 708 orang dan di sekolah swasta 86 orang. Kepala SD yang belum sertifikasi di sekolah swasta yaitu 179 orang.

Kepala SMP yang sudah sertifikasi berjumlah 188 orang, yang bertugas di sekolah negeri 83 orang dan di sekolah swasta 105 orang. Kepala SMP yang belum sertifikasi di sekolah swasta berjumlah 192 orang.



Gambar 3.14

Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Persentase Kepala SD yang sudah sertifikasi sebesar 81,60% dan yang belum sertifikasi sebesar 18,40%. Kepala SMP yang sudah sertifikasi sebesar 48,58% dan yang belum sertifikasi sebesar 51,42%. Total Persentase Kepala sekolah yang sudah sertifikasi sebesar 72,21 % dan yang belum sertifikasi sebesar 27,79%.

d. Pengawas Sekolah

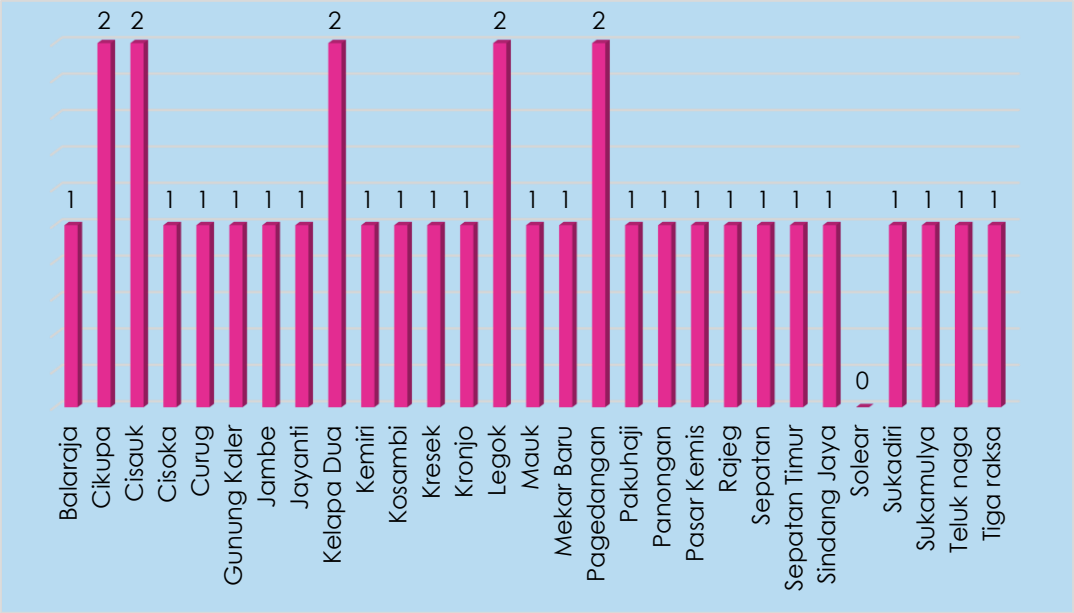
Tugas Pokok Pengawas yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan DAPODIK, berikut data pengawas SD dan SMP.

Tabel 3.16
Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP

Pengawas Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah	Gugus	Sekolah
	Laki-laki	Perempuan			
a. SD	18	10	28	87	1.040
b. SMP	12	6	18	29	463
Jumlah	**30**	**16**	**46**	**116**	**1.503**

Berdasarkan Tabel 3.16, pada jenjang SD rata-rata satu orang pengawas membina 37 sekolah. Sedangkan pada jenjang SMP rata-rata satu orang pengawas membina 26 sekolah.



Gambar 3.15
Sebaran Data Pengawas SD perkecamatan

e. Tenaga Penunjang Kependidikan

Tenaga Penunjang Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun tidak

langsung terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan DAPODIK, berikut data tenaga penunjang kependidikan jenjang SD dan SMP.

Tabel.3.17

Tenaga Penunjang Kependidikan SD

No.	Tenaga Penunjang Kependidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Laboran	0	1	**1**
2	Penjaga Sekolah	375	27	**402**
3	Pesuruh/Office Boy	17	24	**41**
4	Petugas Keamanan	15	9	**24**
5	Tenaga Administrasi Sekolah	272	217	**489**
6	Tenaga Perpustakaan	43	17	**60**
7	Tenaga Kebersihan	4	5	**9**
Jumlah		**726**	**300**	**1.026**

Tabel.3.18

Tenaga Penunjang Kependidikan SMP

No.	Tenaga Penunjang Kependidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Laboran	0	3	**3**
2	Penjaga Sekolah	97	23	**120**
3	Pesuruh/Office Boy	78	22	**100**
4	Petugas Keamanan	46	16	**62**
5	Tenaga Administrasi Sekolah	348	280	**628**
6	Tenaga Perpustakaan	19	13	**32**
7	Tenaga Kebersihan	11	0	**11**
Jumlah		**599**	**357**	**956**

3. Data Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting bagi terciptanya proses pembelajaran karena merupakan pendukung keamanan dan kenyamanan dalam belajar.

Berikut Data komponen sarana prasarana SD dan SMP berdasarkan DAPODIK.

Tabel 3.19

Sarana Prasarana jenjang SD

Sarana Prasarana	SD		Jumlah
	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas	7.825	3.139	10.964
Ruang Guru	850	324	1.174
Ruang TU	124	175	299
Perpustakaan	482	211	693
Laboratorium Komputer	55	151	206
Laboratorium IPA	36	106	142

Berdasarkan Tabel 3.9 jumlah SD 1.040 sekolah terdiri dari 11.325 rombongan belajar dengan ruang kelas yang tersedia 10.964. Ruang guru yang tersedia 1.174, ruang TU 299, perpustakaan 693, Laboratorium Komputer 206, dan Laboratorium IPA 142.

Tabel 3.20

Sarana Prasarana jenjang SMP

Sarana Prasarana	SMP		Jumlah
	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas	2.099	2.830	4.929
Ruang Guru	100	396	496
Ruang TU	90	286	376
Perpustakaan	92	289	381
Laboratorium Komputer	64	249	313
Laboratorium IPA	77	189	266

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah 463 terdiri dari 4.051 rombongan belajar dengan ruang kelas yang tersedia berjumlah 4.929, ruang guru 496,

ruang TU 376, perpustakaan 381, Laboratorium Komputer yang tersedia 313, dan Laboratorium IPA berjumlah 266.

Berdasarkan DAPODIK, berikut Data prasarana sanitasi SD dan SMP berdasarkan DAPODIK.

Tabel 3.21

Prasarana Sanitasi Sekolah Jenjang SD

Sanitasi	Negeri		Swasta		Jumlah
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
WC Guru	512	411	231	220	**1.374**
WC Siswa	939	829	389	358	**2.515**
Jumlah	**1.451**	**1.240**	**620**	**578**	**3.889**
	2.691		**1.198**		

Sanitasi SD terdiri atas WC Guru dan WC siswa. WC guru berjumlah 1.374, dan WC siswa 2.515. Jumlah keseluruhan WC yang tersedia pada jenjang SD yaitu 3.889.

Tabel 3.22

Prasarana Sanitasi Sekolah jenjang SMP

Sanitasi	Negeri		Swasta		Jumlah
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
WC Guru	86	76	294	255	**711**
WC Siswa	173	177	476	430	**1.256**
Jumlah	**259**	**253**	**770**	**685**	**1.967**
	512		**1.455**		

Sanitasi SMP terdiri atas WC Guru dan WC siswa. WC guru berjumlah 711, dan WC siswa 1.256. Jumlah keseluruhan WC yang tersedia pada jenjang SMP yaitu 1.967. Berdasarkan Data Sarana Prasarana di atas, berikut akan disajikan hasil perhitungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana baik pada jenjang SD maupun SMP.

Tabel 3.23

Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP

Ketersediaan Sarpras	SD		SMP	
	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi
Jumlah Sekolah	1.040		463	
Rombongan belajar	11.325		4.051	
Ruang Kelas	10.964	-361	4.929	878
Ruang Guru	1174	134	496	33
Ruang TU	299	-741	376	-87
Perpustakaan	693	-347	381	-82
Laboratorium Komputer	206	-834	313	-150
Laboratorium IPA	142	-898	266	-197
Jamban (WC) Guru	1.374	334	711	248
Jumlah siswa pria	169.055		68.343	
Jumlah siswa wanita	155.507		63.364	
Jamban (WC) Siswa pria	1.328	-1.490	649	-490
Jamban (WC) siswa wanita	1.187	-1.923	607	-660

Kebutuhan ruang kelas dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar. Rombongan belajar pada jenjang SD yaitu 11.325, ruang kelas yang tersedia 10.964 berarti kebutuhan ruang kelas sejumlah 361. Berbeda dengan jenjang SMP rombongan belajar berjumlah 4.051, ruang kelas yang tersedia 4.929 berarti terdapat kelebihan ruang kelas sejumlah 878.

Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA dan jamban guru dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap sekolah minimal memiliki 1 (satu): ruang guru, ruang TU, perpustakaan, Lab. komputer; Laboratorium IPA dan jamban guru.

Kebutuhan jamban peserta didik dihitung berdasarkan standar minimum terdapat 1unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1unit jamban untuk setiap 50 peserta didik Wanita. Pada jenjang SD, kebutuhan jamban siswa pria sejumlah 2.818, yang sudah terpenuhi 1.328, dan yang belum terpenuhi 1.490.

Kebutuhan jamban siswa wanita sejumlah 3.110, yang sudah terpenuhi 1.187, dan yang belum terpenuhi sejumlah 1.923.

Pada jenjang SMP, kebutuhkan jamban siswa pria sejumlah 1.139, yang sudah terpenuhi 649, dan yang belum terpenuhi sejumlah 490. Kebutuhan jamban siswa wanita sejumlah 1.267, yang sudah terpenuhi 607, dan yang belum terpenuhi sejumlah 660. Perhitungan ketersediaan sarana prasarana di atas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu:

a. Kebutuhan ruang kelas dihitung berdasarkan asumsi junlah minimum ruang kelas sama dengan jumlah rombongan belajar.
b. Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer dan laboratorium IPA dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap sekolah minimal memiliki 1 (satu) ruang guru, 1 (satu) ruang TU, 1 (satu) perpustakaan, 1 (satu) Lab. Komputer; dan 1 (satu) Laboratorium IPA.
c. Kebutuhan jamban (WC) guru dan peserta didik dihitung berdasarkan; minimum terdapat 1 (satu) unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 (satu) unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 (satu) unit jamban untuk guru. Berikut data tingkat kerusakan sarana prasarana SD berdasarkan database Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 berdasarkan status sekolah yaitu:

Tabel 3.24

Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SD Negeri

Jenis Sarpras	2019	2020	2021	2022
1. Ruang Kelas				
a. Baik	2.875	2.918	2.973	4.055
b. Rusak Ringan	1.522	1.522	1.500	2.313
c. Rusak Sedang	982	982	967	1.002
d. Rusak Berat	900	879	864	455
Jumlah Ruang Kelas	6.279	6.301	6.304	7.825
2. Perpustakaan				
a. Baik	163	167	190	270
b. Rusak Ringan	244	244	244	212
c. Rusak Sedang	1	1	1	-
d. Rusak Berat	-	-	-	-
Jumlah Perpustakaan	408	412	435	435

Tabel 3.25

Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SD Swasta

Jenis Sarpras	2019	2020	2021	2022
1. Ruang Kelas				
a. Baik	1.113	1.787	1.897	2.289
b. Rusak Ringan	1.354	1.045	1.042	850
c. Rusak Sedang	84	-	-	-
d. Rusak Berat	111	-	-	-
Jumlah Ruang Kelas	2.662	2.832	2.939	3.139
2. Perpustakaan				
a. Baik	70	119	125	157
b. Rusak Ringan	93	72	69	54
c. Rusak Sedang	4	-	-	-
d. Rusak Berat	8	-	-	-
Jumlah Perpustakaan	175	191	194	211

Berikut data sarana prasarana SMP berdasarkan database Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 berdasarkan status sekolah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SMP Negeri

Jenis Sarpras	2019	2020	2021	2022
1. Ruang Kelas				
a. Baik	1.019	1.073	1.181	1.292
b. Rusak Ringan	206	206	186	647
c. Rusak Sedang	248	248	206	123
d. Rusak Berat	178	150	107	37
Jumlah Ruang Kelas	1.651	1.677	1.680	2.099
2. Perpustakaan				
a. Baik	26	31	31	54
b. Rusak Ringan	48	48	48	38
c. Rusak Sedang	1	1	1	-
d. Rusak Berat	1	1	1	-
Jumlah Perpustakaan	76	81	81	92

Tabel 3.27

Tingkat Kerusakan Sarana Prasarana SMP Swasta

Jenis Sarpras	2019	2020	2021	2022
1. Ruang Kelas				
a. Baik	775	1.406	1.379	1.663
b. Rusak Ringan	1.305	1.162	1.283	1.167
c. Rusak Sedang	231	2	-	-
d. Rusak Berat	137	1	-	-
Jumlah Ruang Kelas	2.448	2.571	2.662	2.830
2. Perpustakaan				
a. Baik	74	138	148	176
b. Rusak Ringan	137	119	122	113
c. Rusak Sedang	18	1	-	-
d. Rusak Berat	19	-	-	-
Jumlah Perpustakaan	248	258	270	289

Sumber: Data 2019-2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
2022 Dapodik

Berikut merupakan data sarana prasarana SD berdasarkan DAPODIK Tahun 2022; yang dapat ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.28

Kondisi Sarana Prasarana SD Tahun 2022

Jenis Sarpras SD	Kondisi	
	Jumlah	Persentase
1. Ruang kelas	**10.964**	**100,00%**
a. Baik	6.344	57,86%
b. Rusak ringan	3.163	28,85%
c. Rusak sedang	1.002	9,14%
d. Rusak berat	455	4,15%
2. Ruang Guru	**1.174**	**100,00%**
a. Baik	646	55,03%
b. Rusak ringan	528	44,97%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%

Jenis Sarpras SD	Kondisi	
	Jumlah	Persentase
3. Ruang TU	**299**	**100,00%**
a. Baik	201	67,22%
b. Rusak ringan	98	32,78%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
4. Laboratorium Komputer	**206**	**100,00%**
a. Baik	149	72,33%
b. Rusak ringan	57	27,67%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
5. Laboratorium IPA	**142**	**100,00%**
a. Baik	115	80,99%
b. Rusak ringan	27	19,01%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
6. Perpustakaan	**693**	**100,00%**
a. Baik	427	61,62%
b. Rusak ringan	266	38,38%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%

Tabel 3.29

Kondisi Sarana Prasarana SMP Tahun 2022

Jenis Sarpras SMP	Kondisi	
	Jumlah	Persentase
1. Ruang kelas	**4.929**	**100,00%**
a. Baik	2.955	61,39%
b. Rusak ringan	1.814	4,16%
c. Rusak sedang	123	1,25%

Jenis Sarpras SMP	Kondisi	
	Jumlah	Persentase
d. Rusak berat	37	0,00%
2. Ruang Guru	**496**	**100%**
a. Baik	279	56,25%
b. Rusak ringan	217	43,75%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
3. Ruang TU	**376**	**100,00%**
a. Baik	223	59,31%
b. Rusak ringan	153	40,69%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
4. Laboratorium Komputer	**313**	**100,00%**
a. Baik	196	62,62%
b. Rusak ringan	117	37,38%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
5. Laboratorium IPA	**266**	**100,00%**
a. Baik	177	66,54%
b. Rusak	89	33,46%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%
6. Perpustakan	**381**	**100,00%**
a. Baik	230	60,37%
b. Rusak	151	39,63%
c. Rusak sedang	0	0,00%
d. Rusak berat	0	0,00%

C. Data Pokok Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyelenggarakan program pendidikan yaitu Paket A setingkat jenjang SD, Paket B setingkat jenjang SMP dan Paket C setingkat jenjang SMA.

Satuan PNF sejenis atau yang lebih dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berbentuk Satuan Pendikan Nonformal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

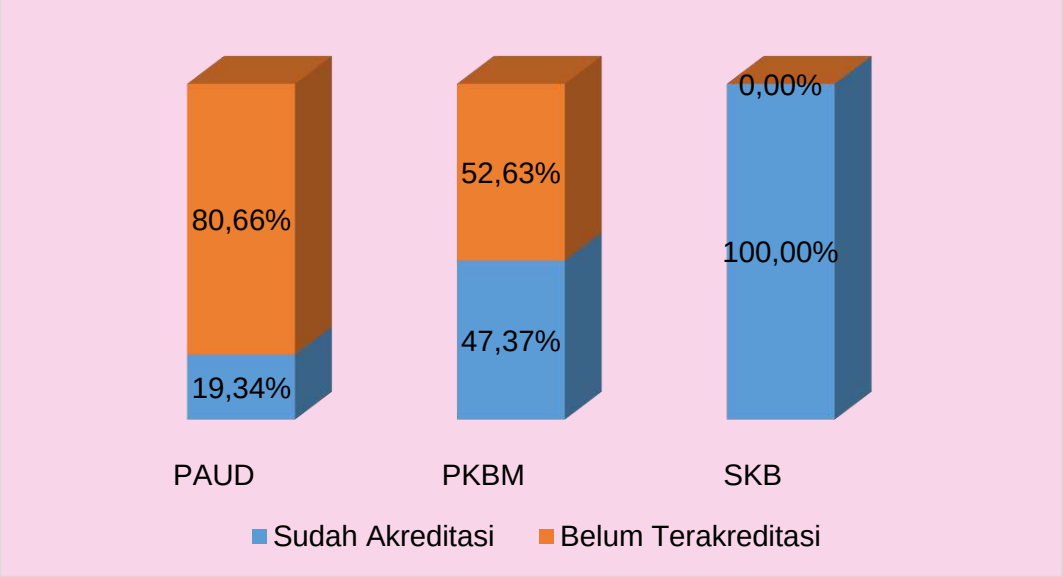
1. Data Lembaga Pendidikan Nonformal

Tabel 3.30

Lembaga Pendidikan Nonformal

No	Lembaga	Status Lembaga		Jumlah
		Sudah Akreditasi	Belum Terakreditasi	
1	PAUD	263	1.097	1.360
2	PKBM	36	40	76
3	SKB	1	0	1

Jumlah PAUD sebanyak 1.360, yang sudah terakreditasi berjumlah 263 lembaga. PKBM sebanyak 76, yang sudah terakreditasi berjumlah 36 lembaga. SKB hanya satu dan sudah terakreditasi.



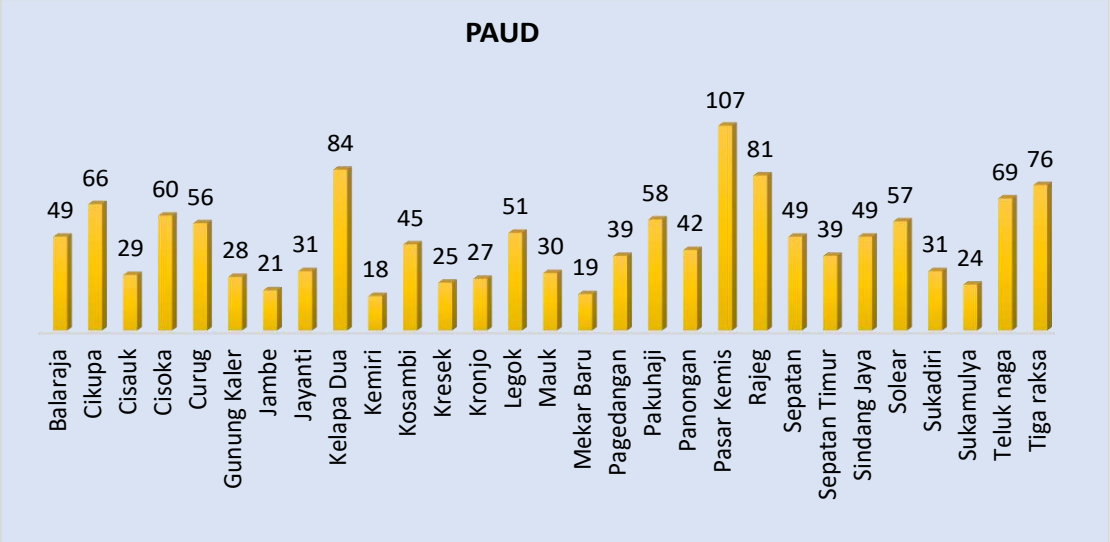
Gambar 3.16

Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal

Persentase Lembaga yang sudah terakreditasi: PAUD sebesar 19,34%; PKBM 47,37% dan SKB 100%. Persentase Lembaga yang belum terakreditasi: PAUD sebesar 80,66% dan PKBM 52,63%.

Berikut Sebaran Data Lembaga Pendidikan Nonformal di tiap kecamatan:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

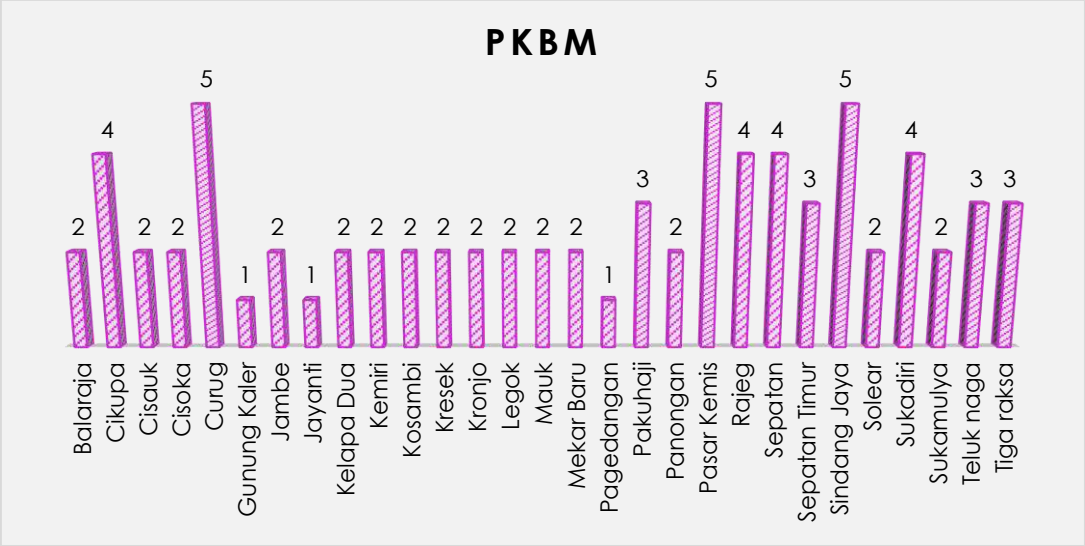


Gambar 3.17

Sebaran Data PAUD

Sejumlah 1.360 PAUD tersebar di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Lembaga PAUD terbanyak ada di Kecamatan Pasarkemis.

b. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)



Gambar 3.18

Sebaran Data PKBM

Sejumlah 76 PKBM tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tangerang. Lembaga PKBM terbanyak yaitu pada kecamatan Curug, Pasarkemis dan Sindang Jaya.

2. Data Peserta Didik/ Wajib Belajar

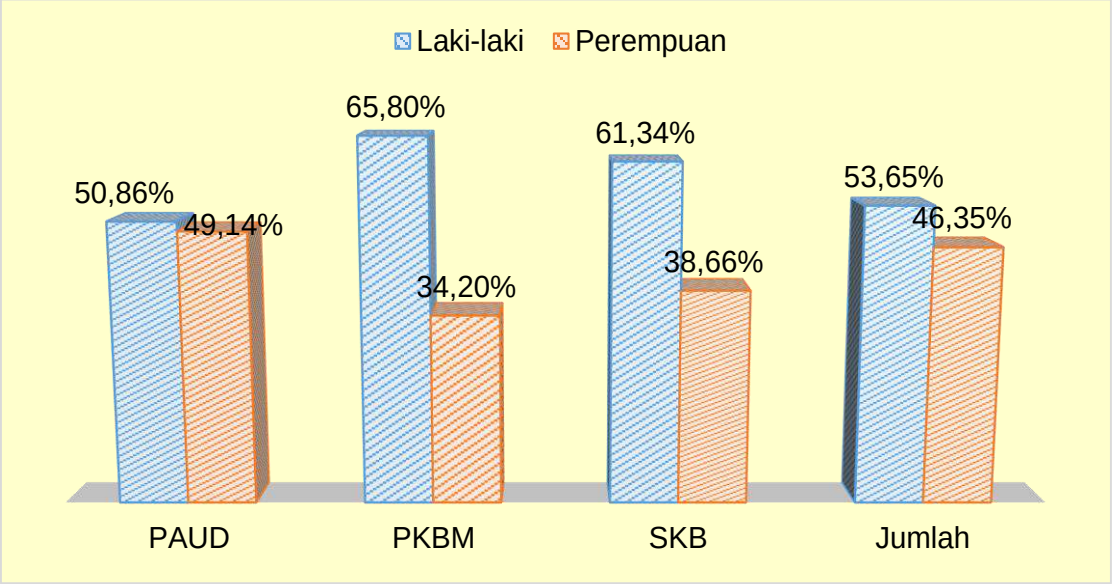
Peserta Didik pada lembaga Pendidikan Nonformal bervariasi, mulai dari kelompok usia 0 sampai 6 Tahun untuk peserta didik PAUD, usia 7 sampai dengan 18 tahun untuk peserta didik SKB, dan usia 7 sampai dengan tidak terbatas bagi peserta didik PKBM.

Tabel 3.31

Data Peserta Didik/ Wajib Belajar

No	Lembaga	Jumlah Peserta Didik/WB		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD	26.189	25.304	51.493
2	PKBM	7.744	4.025	11.769
3	SKB	73	46	119
Jumlah		**34.006**	**29.375**	**63.381**

Jumlah Peserta Didik/ Wajib Belajar 63.381 orang. Peserta Didik Laki-laki berjumlah 34.006 orang dan Perempuan berjumlah 29.375 orang.



Gambar 3.19

Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar

Persentase Peserta Didik laki-laki sebesar 53,65% dan Peseta Didik Perempuan sebesar 46,35%.

3. Data Pendidik Nonformal

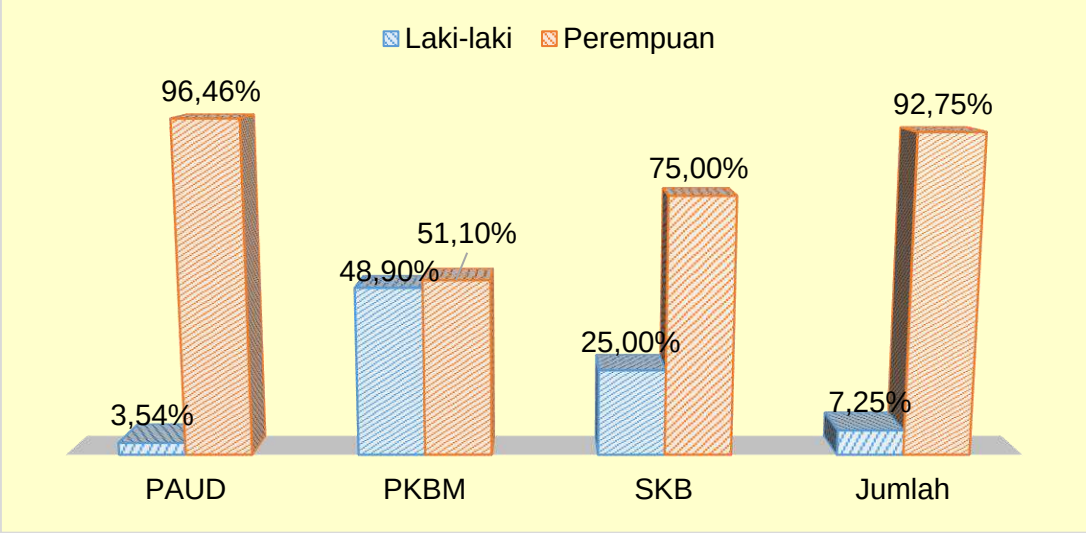
Pendidik pada Lembaga Pendidikan Nonformal dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda; Guru bagi lembaga PAUD, Tutor bagi lembaga PKBM, dan Pamong bagi SKB.

Tabel 3.32

Pendidik Nonformal

No	Lembaga	Jumlah Guru/ Instruktur/ Tutor/ Pamong		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD	128	3.489	3.617
2	PKBM	156	163	319
3	SKB	2	6	8
Jumlah		**286**	**3.658**	**3.944**

Jumlah Pendidik pada Lembaga Pendidikan Nonformal 3.944 orang. Pendidik laki-laki berjumlah 286 orang dan pendidik perempuan berjumlah 3.658 orang.



Gambar 3.20

Persentase Pendidik Nonformal

Persentase Pendidik laki-laki sebesar 7,25% dan Peendidik Perempuan sebesar 92,75%. Namun jika dilihat secara lembaga, Pendidik Laki-laki terkecil pada PAUD sebesar 3,54% dan SKB sebesar 25,00%.

D. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dapat digambarkan dari peningkatan mutu sekolah/ Lembaga, mutu siswa, mutu guru dan mutu sarana prasarana.

1. Peningkatan Mutu Sekolah/ Lembaga

Program peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah antara lain:

a. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM);
b. Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar;
c. Pendampingan Data Pokok Pendidikan;
d. Pendampingan Sekolah Sasaran Akreditasi;
e. Jambore Sanitasi Sekolah; dan
f. Pedampingan Sekolah Model.

2. Peningkatan Mutu Siswa

Program peningkatan mutu siswa antara lain:

a. Fasilitasi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (O2SN);
b. Penyelenggaraan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa;
c. Pemberdayaan dan Penilaian Budaya Mutu Sekolah berupa Lomba Bidang Pembelajaran, Perpustakaan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Lomba Olahraga;
d. Sosialisasi Penanaman Pendidikan Anti Korupsi;
e. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
f. Sosialisasi Narkoba bagi siswa;
g. Pelatihan Kompetensi Bidang Studi Ekstrakurikuler;
h. Pelatihan kompetensi Siswa berprestasi;
i. Pendampingan sekolah model dan rujukan;
j. Pelatihan kompetensi Siswa berprestasi;
k. Peningkatan Prestasi Ekstrakulikuler; dan
l. Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi dan MBR.
m. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3. Peningkatan Mutu Guru

Program peningkatan mutu guru antara lain:

a. Pengembangan Kurikulum;
b. Bedah Standar Kelulusan Sekolah (SKL);
c. Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);
d. Sosialisasi kurikulum SMP dan pengembangan kompetensi pembelajaran dikelas;
e. Pelatihan penyusunan kurikulum 2013;
f. Pedampingan Implementasi Kurikulum 2013;
g. Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
h. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
i. Peningkatan Kompetensi Dan Sertifikasi Calon Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
j. Sosialisasi perundang-undangan bagi Guru Pendidikan dasar;
k. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru; dan
l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan;

4. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana

Program peningkatan mutu sarana prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan berupa:

a. Rehabilitasi ruang kelas;
b. Penambahan ruang kelas baru;
c. Penyediaan mebeulair;
d. Penyediaan alat praktik/ peraga/Media Pembelajaran;
e. Penyediaan Perpustakaan dan Perabotnya;
f. Penyediaan Laboratorium IPA; dan
g. Penyediaan Laboratorium Komputer.

Peningkatan mutu sarana prasarana tersebut bersumber dari Pemerintah pusat, Provinsi, APBD Murni Kabupaten Tangerang dan *stakeholder* lain dalam bentuk program Bantuan Pemerintah, Bantuan Provinsi, Bantuan Sosial, DAK dan/ atau CSR.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Jl. H. Abdul Hamid No.20, Kadu Agung,
Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,
Banten 15720